

#### **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PENGUSAHA KERUPUK PASIR**

Bab ini merupakan paparan temuan lapangan yang terdiri dari dua sub bab. Pertama, sub bab pelaksanaan program pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir oleh pondok pesantren Maslakul Huda, yang terdiri dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kedua, sub bab faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir, yang terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat.

Dari hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa pondok pesantren Maslakul Huda melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat desa Kajen, khususnya bagi pengusaha kerupuk pasir. Di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu pengusaha kerupuk pasir yang ada di desa Kajen mengembangkan usaha mereka sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Upaya tersebut membantu masyarakat desa Kajen dalam mengembangkan kemampuan sendiri yang pada akhirnya masyarakat bebas serta mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan ini masyarakat dibagi menjadi kelompok-kelompok usaha yang difasilitasi oleh tenaga pemberdayaan masyarakat sebagai kader (*agent*) pemberdayaan. Kondisi seperti inilah yang menunjukkan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren Maslakul Huda. Berikut hasil temuan lapangan mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir yang dilaksanakan oleh pondok pesantren Maslakul Huda.

## **A. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pondok Pesantren Maslakul Huda**

### **A. 1. Persiapan**

Keinginan pondok pesantren Maslakul Huda untuk membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk desa Kajen ditanggapi dengan merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pondok pesantren mempunyai pandangan bahwa pemberdayaan masyarakat penting untuk dilakukan dalam upaya menciptakan kemandirian bagi masyarakat dan sebagai satu usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh pimpinan pondok pesantren seperti berikut:

Pada awalnya itu kami memperhatikan adanya ketergantungan dari masyarakat kita akan adanya bantuan-bantuan dari pihak luar. Dulu itu awalnya masyarakat di sini susah untuk berkembang, karena faktor pembangunan yang masih belum merata ya, waktu itu kita masih jauh dari sekarang kondisinya, dulu jalanan masih rusak, belum ada listrik, jadi wajar kalau waktu itu masyarakat masih banyak yang miskin... Kondisi ini berlangsung terus menerus, dan setiap ada bantuan juga hanya bersifat sementara dalam artian tidak dapat membantu masyarakat berkembang. Karena itu kami memikirkan cara lain untuk ikut membantu usaha masyarakat tersebut. kami kemudian mencoba menjalankan strategi pemberdayaan masyarakat (Gus, Mei 2007)

Untuk menjalankan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat tersebut, pondok pesantren mempersiapkan tenaga kader penggerak pemberdayaan masyarakat yang direkrut dari dalam pondok pesantren sendiri, yaitu santri yang menuntut ilmu di pesantren. Persiapan yang dilakukan selain menyiapkan tenaga-tenaga yang akan menjalankan kegiatan pemberdayaan tersebut, adalah dengan membentuk lembaga khusus yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren setelah berdiskusi dengan Gus Dur mengenai keinginan dari pimpinan pondok untuk mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berikut penuturan dari pimpinan pondok pesantren:

kebetulan usaha kita itu mendapatkan dukungan dan bantuan dari teman-teman di LP3ES dan lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, dengan membantu memberdayakan masyarakat tersebut, kami juga berupaya untuk menjalankan syariat Islam dan merupakan bagian dari kemaslahatan umat.

Untuk merealisasikan kegiatan tersebut, kami kemudian mencoba mendirikan lembaga yang khusus menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yakni Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM). sebelumnya kami juga berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gus Dur, waktu itu Gus Dur baru pulang dari Mesir, dan melalui bantuan dari beliau maka kami mendapatkan relasi lembaga-lembaga yang tadi itu (Gus, Mei 2007).

Setelah mendapatkan restu dari Gus Dur, pondok pesantren Maslakul Huda kemudian menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang juga bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah dengan bantuan pelatihan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga lain, LP3ES, yang memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh pondok pesantren. Tentunya pengetahuan yang diperoleh itu tetap diharmonisasikan dengan semangat dan ajaran agama Islam sebagai ciri khas dari pondok pesantren.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat merupakan implementasi dari tiga gagasan besar yang dimiliki oleh pondok pesantren Maslakul Huda ini. Gagasan besar itu antara lain *tarbiyah*, LSM, dan BUMP. Berikut penuturan salah seorang santri mengenai tiga gagasan besar pondok pesantren Maslakul Huda:

Pondok pesantren ini memiliki tiga gagasan besar yang dijalankan untuk tujuan kemaslahatan umat. Yaitu *tarbiyah*, LSM, dan badan usaha milik pesantren.

*Tarbiyah* atau pendidikan itukan sudah menjadi kegiatan utama dalam sebuah pesantren, di mana disini merupakan pusat pendidikan agama Islam. Kemudian LSM, pesantren selain sebagai tempat belajar juga menjadi LSM yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, LSM disini itu dipegang oleh BPPM ya, di mana BPPM ini pada awalnya bekerja sama dengan LP3ES untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, gagasan ketiga itu mendirikan Badan Usaha Milik Pesantren, sekarang kita sudah memiliki BPR, mini market, dan kebun yang menjadi sumber pemasukan dari

pesantren.kita tidak mencari keuntungan dari badan usaha ini, tapi badan usaha ini nantinya akan dikembalikan kepada umat. Jadi begitu intinya adalah kita mengelola uang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat (MA Mei 2007).

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa persiapan yang dilakukan oleh pondok pesantren Maslakul Huda dalam memberdayakan masyarakat sudah dicantumkan dalam gagasan besar yang menjadi visi dari pondok pesantren tersebut. Tiga gagasan besar tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lain sehingga terjalin kesinambungan yang akan membantu kegiatan-kegiatan pondok pesantren.

Pondok pesantren Maslakul Huda ini kemudian memilih untuk melaksanakan program pemberdayaan bagi masyarakat desa Kajen yang berprofesi sebagai pengusaha kerupuk pasir. Pemilihan pengusaha kerupuk pasir ini didasarkan kepada kondisi kemiskinan yang dialami oleh para pengusaha tersebut. Kemiskinan yang dialami mereka bahkan dapat langsung diidentifikasi dari jenis dagangan yang mereka perdagangkan, yakni kerupuk yang digoreng dengan pasir bukan dengan minyak goreng. Para pengusaha ini menggunakan pasir sebagai pengganti minyak goreng bukan karena ingin mencoba resep baru akan tetapi lebih karena ketidakmampuan mereka untuk membeli minyak goreng.

Untuk menentukan program yang tepat bagi para pengusaha kerupuk pasir, dalam rangka pemberdayaan mereka, pondok pesantren Maslakul Huda berusaha untuk melakukan identifikasi kebutuhan dari para pengusaha kerupuk pasir tersebut. Identifikasi kebutuhan tersebut dilakukan melalui FGD atau *Focus Group Discussion* bagi pengusaha kerupuk pasir di desa Kajen tersebut.

Para pengusaha tersebut dikumpulkan di pondok pesantren untuk bersama-sama mencari tahu dan membahas mengenai kebutuhan-kebutuhan serta masalah yang dihadapi mereka terkait dengan usaha kerupuk pasir yang mereka jalankan

selama ini. Kegiatan identifikasi ini ditujukan untuk menampung aspirasi pengusaha kerupuk pasir secara langsung sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka dapat dipenuhi dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka. Mengenai kegiatan FGD bagi pengusaha kerupuk pasir ini, salah seorang santri mengemukakan seperti berikut:

FGD ini dapat diikuti oleh perwakilan setiap desa, nanti ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak muda, ya semuanya di tampung, tapi dulu untuk pelaksanaan pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir, anggota FGDnya ya cuma pengusaha kerupuk pasir...Kita mencari tau di masyarakat mengenai permasalahan yang mereka hadapi dan kebutuhan serta harapan mereka, dengan FGD itu para pengusaha kerupuk pasir ini menceritakan pengalaman mereka, intinya keluh kesah mereka kita dengarkan dan kita tampung. (AS, Mei 2007).

Melalui kegiatan FGD ini, pondok pesantren Maslakul Huda dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan para pengusaha kerupuk pasir ini dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Berbagai aspirasi dari pengusaha ditemukan dalam kegiatan FGD ini. Seperti kebutuhan akan adanya lembaga keuangan seperti BPR yang dapat membantu mewujudkan keinginan masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka. Seperti pendapat dari Camat Margoyoso berikut ini:

Itu kalau tidak salah saya adalah dengan melakukan FGD ya namanya,jadi dengan FGD itu pondok pesantren bisa tahu tentang kebutuhan masyarakatnya seperti kebutuhan akan adanya lembaga keuangan seperti BPR itu. Tapi kalau dari pemerintah kita masih menggunakan musrenbang sebagai saluran untuk menjaring aspirasi masyarakat (Wid, Mei 2007).

Selain melakukan FGD, kegiatan survey di lapangan juga dilakukan oleh santri-santri dari pondok pesantren Maslakul Huda. Kegiatan survey ini merupakan bentuk klarifikasi dan identifikasi di lapangan. Yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah memang kondisi pengusaha kerupuk pasir adalah seperti yang mereka kemukakan dalam kegiatan FGD, apakah kebutuhan yang mereka sampaikan benar-benar merupakan kebutuhan mereka bukan sekedar

keinginan mereka saja. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah seorang santri berikut ini:

Kita melakukan survey di lapangan, untuk mencari tau di lapangan tentang kondisi pengusaha kerupuk pasir itu, kan kita sudah mendengarkan keluh kesah mereka dalam FGD, jadi kita ingin *cross check* di lapangan benar atau ngga kebutuhan mereka seperti yang disampaikan dalam FGD itu, bisa jadi kan kalo ternyata itu cumainginnya mereka aja bukan butuhnya mereka (Irf, Juni 2007).

Kegiatan survey ini dilakukan setelah santri-santri mendapatkan pembekalan terlebih dahulu mengenai pelatihan pemberdayaan masyarakat. Santri yang sudah mendapatkan pelatihan tersebut diistilah sebagai tenaga pemberdayaan masyarakat atau TPM. Pengurus BPPM menjabarkannya seperti berikut ini:

Pada awalnya BPPM pada tahun 1979-an, bekerjasama dengan LP3ES mengursuskan santri yang sudah senior di bidang pemberdayaan masyarakat (Tenaga Pemberdayaan Masyarakat). Kemudian para alumni TPM diarahkan untuk mensosialisasikan pengetahuan yang telah diperoleh kepada masyarakat sekitar. Dengan mengundang 13 desa, masing-masing desa mengirimkan 2 orang utusan. Kemudian dilatih selama 1 tahun, 1 bulan kelas, 4 bulan di lapangan, 1 bulan *workshop*. Dengan diadakan survei ke lapangan (beberapa desa) terlebih dahulu oleh santri, sehingga dapat diinventarisir masalah dan model pembangunan/pemberdayaan seperti apa yang sesuai dengan kondisi desa tertentu. Awalnya survei dilakukan 1 tahun sekali, selanjutnya setiap 6 bulan sekali. (Skd, Mei 2007).

Dari penjelasan pengurus BPPM tersebut, diketahui bahwa kegiatan survey kebutuhan masyarakat dilakukan di awal pelaksanaan kegiatan ini yang bertujuan untuk menginventarisir masalah dan model pemberdayaan maupun pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Sedangkan survey selanjutnya dilakukan untuk melihat kemajuan usaha kelompok, yaitu berupa pengamatan lapangan mengenai proses kegiatan usaha kelompok. Berikut penjelasan tambahan dari pengurus BPPM mengenai hal tersebut:

Iya, maksudnya itu kita pada awalnya melakukan survey lapangan untuk menginventarisir masalah di masyarakat, survey selanjutnya itu lebih tepatnya dikatakan sebagai pengawasan di lapangan yang melihat proses kegiatan usaha kelompok pengusaha kerupuk pasir itu, tujuannya untuk mengukur kemajuan usaha mereka, kita ada form khusus yang menilai penambahan modal atau keuntungan usaha, itu yang kita maksud dengan survey selanjutnya (Skd, Juni 2007).

Jadi, tahap persiapan yang dilaksanakan oleh pondok pesantren Maslakul Huda dalam program pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir ini adalah dengan membentuk badan internal pesantren yang menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini yaitu Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM), memberikan pelatihan kepada santri untuk menjadi Tenaga Pemberdayaan Masyarakat (TPM), melakukan kegiatan FGD untuk mengetahui kebutuhan pengusaha kerupuk pasir, serta melakukan survey di lapangan yang bertujuan untuk klarifikasi dan identifikasi model pemberdayaan bagi pengusaha kerupuk pasir tersebut serta bertujuan untuk mengukur kemajuan usaha kelompok.

#### A. 2. Perencanaan

Selanjutnya pondok pesantren Maslakul Huda melakukan kegiatan perencanaan program yang terkait dengan upaya pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir tersebut. Perencanaan dilakukan dengan melihat dari hasil pelaksanaan FGD pada tahap persiapan. Dari hasil FGD tersebut, pondok pesantren Maslakul Huda menetapkan program pengembangan usaha kerupuk pasir di masyarakat desa Kajen. Dalam proses perencanaan program ini juga diperbandingkan antara hasil FGD dengan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh TPM.

Salah seorang pimpinan pondok pesantren menjelaskan latar belakang pemilihan pengusaha kerupuk pasir yang menjadi sasaran program pemberdayaan oleh pondok pesantren Maslakul Huda. Berikut penjelasan yang dikemukakan beliau:

Karena miskin itu mereka berusaha dengan apa yang mereka punya, seadanya. Karena desa Ngemplak yang bersebelahan dengan Kajen itu dikenal dengan produksi tapiokanya. Memang daerah sini itu tumbuhan jenis singkong sama ketela cukup subur jadi itukan bahan baku dari tapioka. Masyarakat tau kalau tapioka itu bahan dasar dari pembuatan krupuk, mereka kemudian banyak yang berusaha membikin kerupuk. Tapi kembali ke persoalan kemiskinan tadi itu, masyarakat berusaha dengan kemampuan seadanya. Karena mereka tidak bisa untuk membeli minyak goreng untuk menggoreng kerupuk, maka dengan keterbatasannya itu masyarakat memikirkan alternatif lain untuk menyediakan kerupuk. Cara yang mereka gunakan adalah dengan menggoreng kerupuk dengan memanfaatkan pasir. Kemudian kerupuk itu dikenal dengan sebutan kerupuk pasir. Kondisi ini berlangsung terus menerus, dan setiap ada bantuan juga hanya bersifat sementara dalam artian tidak dapat membantu masyarakat berkembang. Karena itu kami memikirkan cara lain untuk ikut membantu usaha masyarakat tersebut. kami kemudian mencoba menjalankan strategi pemberdayaan masyarakat (Gus, Mei 2007).

Gambar berikut menunjukkan proses pembuatan kerupuk pasir yang dilakukan oleh salah seorang pengusaha kerupuk pasir desa Kajen.

Gambar 9 Kegiatan Usaha Kerupuk Desa Kajen



Program pengembangan usaha kerupuk pasir ini dilakukan dengan memberikan bantuan pinjaman modal usaha bagi para pengusaha kerupuk pasir. Bantuan tersebut tidak diberikan secara langsung kepada individu akan tetapi melalui prosedur kelompok. Dengan tujuan untuk mempermudah pendistribusian pinjaman dan mempermudah pengawasan dalam pelaksanaannya nanti. Berikut penjelasan salah seorang santri:

Kita memberikan bantuan itu melalui kelompok, karena dapat memudahkan pendistribusian pinjaman dan kita juga gampang untuk melakukan pengawasan. Coba kalau individu kan bisa-bisa kita harus bagiin itu semua ke seratusan orang misalnya tapi kalau berkelompok kan kita cuma ngawasin lima atau sepuluh kelompok jadi lebih efektif dan efisien bagi kita (Irf, Juni 2007).

Kegiatan pemberian pinjaman modal usaha bagi pengusaha kerupuk pasir tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat desa melalui santri-santri yang menjadi tenaga pemberdayaan masyarakat atau TPM. Kemudian juga dilakukan pendekatan personal kepada calon-calon peminjam yang akan menjadi target sasaran dari kegiatan ini dengan menggunakan metode *door to door* atau langsung ke rumah-rumah penduduk desa Kajen yang berprofesi sebagai pengusaha kerupuk pasir. Kegiatan ini pada awalnya mendapatkan penolakan dari masyarakat. Karena adanya anggapan bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh pondok pesantren, sudah melenceng dari tradisi pesantren yang bergerak di bidang pendidikan agama. Berikut pemaparan dari pengurus BPPM mengenai masalah tersebut:

Kemudian TPM yang mensosialisasikannya kepada masyarakat desa khususnya pengusaha kerupuk pasir. Melalui pendekatan personal pada target sasaran dari dengan menggunakan metode *door to door* atau langsung ke rumah-rumah penduduk desa Kajen yang berprofesi sebagai pengusaha kerupuk pasir. Tapi awalnya kita mendapatkan penolakan dari masyarakat. Karena masyarakat menganggap kalau kegiatan sosial yang dilakukan pondok pesantren itu keluar dari tradisi pesantren, karena kita dilihat sebagai tempat menuntut ilmu agama Islam (Skd, Mei 2007).

Pernyataan tersebut dipertegas dengan penjelasan dari pimpinan pondok pesantren yang memaparkan adanya penolakan dari masyarakat desa Kajen akan program pemberdayaan yang ditawarkan oleh pondok pesantren Maslakul Huda. Akan tetapi meskipun sempat terjadi penolakan dari masyarakat, pelaksanaan program tetap dijalankan dan akhirnya bisa diterima oleh masyarakat desa Kajen.

Selain itu hambatan lain pada awalnya itu adalah penerimaan dari masyarakat, di mana masyarakat masih belum terbiasa dengan adanya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pesantren, mereka taunya kalo pesantren itu merupakan tempat belajar agama Islam saja. Tapi setelah kita kasi penjelasan bahwa kegiatan pemberdayaan yang kita lakukan itu merupakan bagian dari penerapan ajaran agama Islam. Karena dengan membantu masyarakat kita juga berarti menyiarkan ajaran agama Islam disamping kewajiban kita juga untuk saling membantu sesama umat muslim (Gus, Mei 2007).

Setelah masyarakat desa Kajen menerima kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pondok pesantren Maslakul Huda, langkah selanjutnya dalam tahap perencanaan ini adalah mengorganisasir pengusaha kerupuk pasir yang menerima bantuan kelompok-kelompok usaha. Pondok pesantren memberikan kebebasan kepada pengusaha kerupuk pasir untuk membentuk kelompok sendiri. Umumnya pembentukan kelompok usaha tersebut berdasarkan pada kedekatan lokasi usaha dan tempat tinggal serta dari hubungan kekeluargaan.

Pembentukan kelompok tersebut harus memperhatikan perbandingan jumlah anggota kelompok yang ditetapkan oleh pondok pesantren Maslakul Huda. Kelompok harus memiliki perbandingan yaitu 75% berasal dari pengusaha yang tergolong sangat miskin dan 25% dari pengusaha yang tergolong kelas di atasnya. Hal ini dilakukan sebagai strategi untuk peralihan tanggung jawab apabila suatu saat program telah berhenti.

Di awal pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir ini, terbentuk 10 kelompok dari 249 orang pengusaha kerupuk pasir, dengan jumlah anggota terbanyak 20 orang dan paling sedikit 18 orang. Saat ini, program pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir ini bertambah menjadi 20 kelompok dari 430 orang pengusaha kerupuk pasir dengan jumlah anggota terbanyak 21 orang dan paling sedikit 20 orang.

Setelah pembentukan kelompok, kegiatan selanjutnya adalah menentukan kepengurusan kelompok yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara kelompok. Pemilihan ketua kelompok dan kepengurusan lainnya ini dilakukan oleh anggota kelompok dengan difasilitasi oleh tenaga pemberdayaan masyarakat yang menjadi perpanjangan tangan dari pondok pesantren. Dengan menerapkan proses ini, pondok pesantren juga mengajarkan kepada masyarakat mengenai demokrasi. Prinsip pengajaran berdemokrasi ini sesuai dengan gagasan besar dari pondok pesantren Maslakul Huda. Di mana dalam gagasan besar tersebut tercantum tiga tata cara ajaran Islam dalam memandang kehidupan, yaitu *musawah* (prinsip persamaan), *'adalah* (prinsip keadilan), dan *syura* (prinsip musyawarah). Berikut kutipan wawancara dengan pimpinan pondok pesantren mengenai hal tersebut:

Selain itu juga, pelaksanaan program ini juga mengajarkan nilai-nilai ajaran agama Islam secara langsung kepada masyarakat. Dalam Islam terdapat tiga tata cara pandang mengenai kehidupan yaitu *musawah* (prinsip persamaan), *'adalah* (prinsip keadilan), dan *syura* (prinsip musyawarah). Secara langsung dimaksudkan karena dalam pelaksanaan program ini, masyarakat kita kumpulkan menjadi kelompok-kelompok, dan melalui kelompok tersebut masyarakat akan menerapkan tiga cara pandang itu tadi (Gus, Mei 2007).

Selain mengajarkan nilai-nilai ajaran agama Islam, pondok pesantren juga mewajibkan anggota kelompok untuk melakukan tertib administrasi dengan mengatur pencatatan yang berkaitan dengan kegiatan kelompok. Seperti misalnya pencatatan mengenai keuangan, pencatatan mengenai rapat-rapat kelompok, maupun pencatatan

mengenai target dan pencapaian dari hasil usaha kelompok. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh tenaga pemberdayaan masyarakat dari pondok pesantren.

Mengenai pertemuan kelompok, pondok pesantren memberikan kebebasan kepada kelompok untuk mengatur jadwal pertemuan. Apakah diadakan setiap minggu atau setiap bulan. Tetapi pada umumnya pertemuan kelompok diadakan setelah selesai sholat isya, karena alasan waktu yang kosong bagi masyarakat desa adalah setelah sholat isya. Akan tetapi, meskipun pihak pondok pesantren tidak memberikan aturan yang ketat mengenai pertemuan kelompok ini, pertemuan anggota kelompok merupakan salah satu indikator keberhasilan dari pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pondok pesantren ini karena pertemuan tersebut memberikan kesempatan dilakukannya *sharing idea* dan *sharing experience* antara anggota kelompok. Berikut penjelasan dari pengurus BPPM mengenai pertemuan kelompok:

Kunci keberhasilan suatu kelompok adalah manakala ada pertemuan-pertemuan rutin. Pertemuan ini mencerminkan aktifitas dan intensitas kerja kelompok efektif di tiap kelompoknya. Karena setiap pertemuan dijadikan sebagai tempat *sharing idea* dan *sharing experience*. Meskipun kita tidak memberikan jadwal kapan pertemuan kelompok diadakan, karena kita membebaskan kepada kelompok untuk mengatur jadwal pertemuan mereka sendiri. Kalau jam pertemuan kelompok biasanya dilakukan ba'da isya, karena masyarakat desa biasanya tidak ada aktifitas pada saat itu (Skd, Mei 2007).

Gambar 10 Salah Satu Kelompok Kegiatan Usaha Kerupuk Desa Kajen



Gambar di atas menunjukkan aktifitas pertemuan salah satu kelompok usaha kerupuk pasir yang dikelola oleh ibu-ibu. Selain itu, dari gambar di atas juga dapat dilihat bahwa pondok pesantren Maslakul Huda tidak membatasi keanggotaan kelompok berdasarkan jenis kelamin.

Jadi pada tahap perencanaan ini, dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren Maslakul Huda melakukan kegiatan antara lain merancang program bantuan bagi pengusaha kerupuk pasir berdasarkan hasil FGD dan survey di lapangan, mensosialisasikan program bantuan kepada masyarakat dengan sistem pendekatan personal, dan mengorganisir masyarakat dengan cara membentuk kelompok-kelompok usaha yang akan menjadi sasaran program bantuan.

### A. 3. Pelaksanaan

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pondok pesantren Maslakul Huda dalam melaksanakan program pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir desa Kajen adalah menyalurkan pinjaman modal usaha kepada kelompok-kelompok usaha kerupuk pasir. Pada tahap pembentukan kelompok sebelumnya, selain disepakati adanya kepemimpinan di dalam kelompok, disepakati juga adanya modal bersama milik kelompok. Pada umumnya modal kelompok diperoleh dari tabungan kelompok yang besarnya tergantung dari kesepakatan di dalam kelompok. Terdapat tiga jenis peningkatan modal yang ada di dalam kelompok, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

Simpanan pokok adalah simpanan awal yang jumlahnya sama untuk seluruh anggota, besarnya berkisar antara Rp. 5000 sampai dengan Rp. 10.000. Pembayaran simpanan pokok ini dapat dilakukan dengan cara mengangsur tergantung kemampuan dari anggota kelompok. Simpanan wajib merupakan jumlah simpanan tetap yang wajib dibayar oleh anggota kelompok secara terjadwal dan rutin. Sedangkan

simpanan sukarela atau simpanan manasuka merupakan simpanan yang tidak ditentukan jumlah maupun waktunya. Berikut pemaparan salah seorang anggota kelompok mengenai kegiatan peningkatan modal kelompok ini:

Pinjaman modal itu diberikan kepada kelompok setelah kelompok mempunyai modal bersama atau modal kelompok. Modal kelompok itu terdiri dari simpanan pokok, yang jumlahnya itu biasanya Rp. 5000 sampai dengan Rp. 10.000. Simpanan wajib itu simpanan pokok yang dibayar tiap bulan, misalnya kelompok sepakat simpanan kelompok lima ribu jadi simpanan wajib tiap bulannya ya lima ribu juga. kalo simpanan sukarela manasuka ya bebas, suka-suka aja kapan mau ngasi dan berapa mau ngasinya (Mh, Mei 2007).

Bentuk simpanan kelompok tersebut tergantung dari tingkat kelayakan usaha yang dijalankan oleh kelompok. Sehingga dengan semakin besarnya modal swadaya kelompok, maka akan semakin membuka peluang bagi kelompok untuk menciptakan usaha baik skala kecil maupun skala besar.

Untuk mencapai tujuan kelompok dalam peningkatan modal kelompok tersebut, maka pondok pesantren Maslakul Huda kemudian memberikan insentif berupa modal pinjaman kepada kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan insentif yang berbeda, tergantung dari modal awal kelompok tersebut. Jumlah pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp. 500 ribu hingga Rp. 5 juta. Dengan tingkat bunga pengembalian sebesar 0,5%. Pada awalnya tingkat bunga adalah 0%, tetapi seiring dengan kemajuan usaha kelompok, pinjaman diberikan dengan tingkat bunga 0,5% dan diangsur selama sepuluh kali angsuran. Berikut penuturan pengurus BPPM:

Pada awalnya, dana pinjaman bergulir diberikan kepada setiap kelompok tanpa beban bunga. Untuk sekarang, dikarenakan sudah maju, para kelompok dibebani bunga 0,5% dari dana yang dipinjamkan. Adapun bantuan yang digulirkan bervariasi, ada yang 500 ribu sampai 5 juta, tergantung kelayakan kelompok (Skd, Mei 2007).

Tambahan modal yang diberikan oleh pondok pesantren tersebut menerapkan sistem tanggung renteng. Pinjaman yang diberikan juga menggunakan perbandingan dengan modal swadaya kelompok, yakni 1 banding 5. Misalnya modal swadaya kelompok adalah Rp. 500 ribu, maka pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp. 2,5 juta dengan pengembalian selama sepuluh kali angsuran dan dengan bunga 0,5 % atau sebesar Rp. 12.500.

Ketetapan untuk mengembalikan pinjaman dengan bunga sebesar 0,5% oleh pondok pesantren Maslakul Huda ini bertujuan untuk mengajarkan kepada kelompok mengenai budaya menabung. Kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sampai saat ini sebanyak 60% kelompok sudah mengembalikan pinjaman yang diberikan. Dan saat ini kegiatan ini juga sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan formil yakni BPR Artha Huda. Maksud dari kerja sama ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada kelompok-kelompok usaha baru yang menginginkan pinjaman modal untuk peningkatan usaha mereka.

Selanjutnya, setiap kelompok diwajibkan untuk melaporkan kepada pondok pesantren melalui TPM mengenai jumlah simpanan pokok mereka. Setelah diketahui jumlah simpanan pokok atau modal usaha awal di dalam kelompok, maka dapat dihitung besaran bantuan modal bagi kelompok tersebut. Bantuan yang sudah ditetapkan untuk masing-masing kelompok tersebut kemudian disampaikan kepada masing-masing ketua kelompok melalui TPM. TPM kemudian melakukan pencatatan mengenai jumlah bantuan yang disampaikan, tanggal penerimaan, serta bukti-bukti lainnya. Pencatatan ini juga dilakukan dihadapan kelompok, dan disimpan sebagai kopian arsip kelompok. Hal ini penting untuk mengajarkan kepada kelompok arti dari transparansi dan pertanggung jawaban. Berikut penuturan salah seorang TPM mengenai hal tersebut:

Kelompok melaporkan jumlah simpanan pokok mereka, dari situ kita hitung berapa jumlah bantuan yang akan diberikan kepada kelompok, setelah itu

hasilnya disampaikan kepada kelompok, uangnya biasanya dipegang oleh bendahara kelompok setelah ketua kelompok menanda tangani bukti penerimaan dengan disaksikan anggota yang lain. Kalau anggota ada yang tidak hadir kita tidak mencairkan bantuannya, karena kita mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, selain mengajarkan mereka mengenai transparansi dan pertanggung jawaban (Irf, Juni 2007).

Setelah menyalurkan bantuan modal usaha tersebut, anggota TPM kemudian memberikan penyuluhan dan konsultasi kepada kelompok-kelompok mengenai peningkatan usaha mereka, melakukan pelatihan administrasi kepada kelompok, serta mengadakan *workshop* mengenai usaha kelompok dengan melibatkan intansi terkait dan pengusaha.

Kegiatan penyuluhan dan konsultasi kepada kelompok mengenai peningkatan usaha kelompok dilakukan oleh TPM sebagai langkah kedua dalam tahap pelaksanaan program pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir desa Kajen ini. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk melakukan inventarisasi potensi dan permasalahan yang ada di dalam kelompok, sedangkan kegiatan konsultasi dilakukan dalam dua bentuk yaitu konsultasi perorangan dan konsultasi kelompok. Konsultasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota kelompok dan memfasilitasi berfungsinya kelompok sebagai wahana kerja sama melalui pertemuan kelompok. Ketua BPPM menjelaskannya sebagai berikut:

Setelah itu kita mengerahkan TPM untuk memberikan penyuluhan dan konsultasi kepada kelompok, penyuluhan itu tujuannya untuk menginventarisir potensi-potensi kelompok serta permasalahan yang ada, kemudian kalau konsultasi itu dapat dilakukan secara individu atau kelompok, tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan anggotanya serta untuk memfasilitasi kelompok supaya dapat berfungsi sebagai wahana kerja sama, konsultasi dan penyuluhannya ini kita lakukan melalui pertemuan kelompok, jadi dari kita atau TPM itu rutin mengikuti kegiatan pertemuan kelompok untuk melakukan penyuluhan dan konsultasi itu (Skd, Juni 2007).

Selain kegiatan penyuluhan dan konsultasi mengenai pengembangan usaha kelompok, TPM juga mengadakan kegiatan pelatihan administrasi kepada kelompok.

Pelatihan administrasi ini meliputi pelatihan pencatatan surat-surat baik surat keluar maupun surat masuk dalam kegiatan usaha kelompok, pencatatan hasil pertemuan kelompok, serta pencatatan data permodalan kelompok yang menunjukkan realisasi keuangan kelompok. Mengenai pencatatan permodalan kelompok ini, TPM memberikan *form* isian yang tinggal diisi oleh masing-masing kelompok setiap akhir bulannya. Berikut contoh *form* isian tersebut:

*form 1*

Data Permodalan Kelompok.....  
Tahun.....

Bulan	Realisasi Keuangan									Ket
	Kas	Tabungan	Piutang	Investasi	Simpanan	Hutang	Hibah	Laba	Lainnya	
Januari										
Februari										
Maret										
April										
Mei										
Juni										
Juli										
Agustus										
September										
Oktober										
November										
Desember										

Dokumen BPPM Maslakul Huda

Kegiatan yang juga dilakukan dalam tahap pelaksanaan ini adalah kegiatan *workshop* mengenai usaha kelompok yang berkerja sama dengan instansi terkait dan pihak pengusaha. *Workshop* ini bertujuan untuk memasarkan hasil usaha kelompok dan mencari ‘bapak asuh’ bagi kelompok-kelompok. Kegiatan ini dilakukan di halaman depan pondok pesantren Maslakul Huda, yang berguna untuk memudahkan pemusatan acara tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan pihak BPPM:

Kita juga melakukan workshop dari hasil usaha pengusaha ini, biasanya kita mengadakannya bareng dengan dinas perdagangan kabupaten, karena mereka nanti yang mengundang pengusaha rekanan mereka untuk menyeleksi anggota kita untuk dijadikan bagian dari mereka, atau istilahnya mereka yang jadi 'bapak asuh'nya gitu.. (Skd, Juni 2007).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan ini pondok pesantren melakukan kegiatan-kegiatan antara lain menyusun laporan simpanan pokok kelompok, menghitung besaran bantuan yang akan diberikan kepada masing-masing kelompok, menyalurkan bantuan kepada kelompok, memberikan penyuluhan dan konsultasi kepada kelompok-kelompok, melakukan pelatihan administrasi, serta mengadakan *workshop* mengenai usaha kelompok.

#### A. 4. Evaluasi

Dalam pelaksanaan program ini, kegiatan evaluasi dan pengawasan dilakukan oleh tenaga pemberdayaan masyarakat (TPM), yang menjadi kader dalam program pemberdayaan masyarakat pondok pesantren Maslakul Huda ini. Pengawasan dilakukan secara langsung dengan terjun ke lapangan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha kelompok dan juga melihat proses yang terjadi di dalam kelompok. Selain itu, pondok pesantren, melalui BPPM ini juga melakukan akreditasi bagi kelompok-kelompok yang mendapatkan bantuan peningkatan modal. Berikut kutipan wawancara dengan pengurus BPPM yang menegaskan kegiatan ini:

Untuk monitoring, dari BPPM turun lapangan ke lokasi untuk mengadakan penilaian dan kategorisasi kelompok A, B, dan C. Kelompok A adalah kelompok yang dianggap sudah maju atau mampu secara keseluruhan, baik dalam hal pendanaan, produksi, dan marketing. Sehingga untuk kelompok ini diberi keleluasaan atau semacam rekomendasi untuk memperoleh pinjaman dana yang lebih besar ke bank atau penyedia dana yang lain. Untuk selanjutnya, tergantung dari pihak bank atau penyedia dana lain mengadakan uji kelayakan (*feasibility test*) terhadap kelompok dimaksud. Apabila sudah mendapatkan 'bapak asuh', pondok pesantren tidak lagi memberikan bantuan

kepada kelompok, karena dianggap sudah mandiri. Tapi sampai saat ini masih belum ada kelompok usaha kerupuk pasir yang sudah mendapatkan ‘bapak asuh’ atau pinjaman yang lebih besar dari bank. Kelompok B adalah kelompok yang sudah sedikit lebih maju dalam mengelola dan memenej kelompok, baik dalam hal pendanaan, produksi, dan marketing. Untuk kelompok C adalah kelompok yang masih sangat butuh bimbingan dan pengarahan (*assistance*), baik dalam hal pendanaan, produksi, dan marketing (Skd, Mei 2007).

Dari akreditasi tersebut dapat dilihat adanya tiga kategori kelompok peminjam yaitu kelompok dengan tingkat A, kelompok dengan tingkat B, dan kelompok dengan tingkat C. Kelompok dengan tingkat A adalah kelompok yang sudah maju dan sudah layak untuk mendapatkan rekomendasi untuk penambahan modal usaha. Kelompok dengan tingkat B adalah kelompok yang sudah dapat mengelola keuangan dan manajemen di dalam kelompok. Sedangkan kelompok dengan tingkat C adalah kelompok yang masih perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari tenaga pemberdayaan masyarakat pondok pesantren Maslakul Huda.

Kelompok dengan tingkat A merupakan kelompok yang sudah berhasil melakukan peningkatan modal/ laba yang diperoleh setelah para pengusaha kerupuk pasir tersebut mendapatkan pinjaman modal usaha, peningkatan jumlah produk yang dihasilkan oleh kelompok pengusaha pasir tersebut, serta pemasaran hasil usaha dengan melibatkan ‘bapak asuh’ atau dengan berusaha sendiri mencari pasar di luar kecamatan Margoyoso atau bahkan di luar provinsi Jawa Timur. Setelah mendapatkan ‘bapak asuh’, kelompok dengan tingkat A ini kemudian sepenuhnya lepas dari bimbingan pondok pesantren atau dengan kata lain dikatakan sudah mandiri. Salah seorang anggota kelompok menjelaskan mengenai kategorisasi dalam kelompok usaha sebagai berikut:

Jadi di dalam kelompok-kelompok ini kita dibagi-bagi menjadi tiga tingkatan yaitu tingkat A,B, dan C. kalau A itu yang paling bagus, kelompok udah punya modal yang besar dan biasanya udah kerja sama dengan perusahaan dalam pemasaran usahanya. Kalau usaha kelompok saya masih tergolong

kelompok tingkat B, karena modal kami walaupun sudah bisa dikatakan untung tapi kami masih kesulitan untuk memasarkan hasil usaha kelompok kami. Tapi ya, setidaknya kita udah meningkat dari kelompok tingkat C menjadi tingkat B ini (Rkt, Juni 2007).

Pada kelompok dengan tingkatan B dapat dilihat berdasarkan pertemuan kelompok yang sudah terjadwal dan diikuti oleh semua anggota kelompok, pencatatan hasil pertemuan kelompok, serta pengaturan modal atau keuangan di dalam kelompok yang sudah tertib dan rapi. Namun, meskipun demikian kelompok masih belum dapat meningkatkan modal/laba yang diperoleh karena masih terhambat dalam pemasaran hasil produksi kelompok.

Yang terakhir, yaitu kelompok dengan tingkat C. Kelompok dengan akreditasi ini merupakan kelompok yang masih tertinggal dibandingkan dengan kelompok lain. Dalam kelompok ini, kesulitan tidak hanya di dalam pemasaran hasil produksi kelompok, akan tetapi juga di dalam mengorganisasi kelompok. Kelompok masih kurang dalam hal tertib administrasi, pertemuan kelompok yang belum terjadwal rutin, serta pengaturan modal atau keuangan di dalam kelompok yang belum rapi. Mengenai hal ini, salah seorang anggota dari kelompok dengan tingkat C memaparkannya sebagai berikut:

Kelompok yang masih tergolong kelompok tingkat C, itu kelompok yang biasanya baru saja bergabung dengan kegiatan pondok, ada di tingkat C karena kelompok tersebut masih belum tertib administrasi dan keuangan, masih belum rutin dalam mengadakan pertemuan kelompok, jadi dari masalah-masalah seperti itu saja mereka belum bisa memanejanya, mungkin ini juga yang menyebabkan mereka masih kesulitan dalam meningkatkan modal dan keuntungan usaha mereka (Rkt, Juni 2007).

Penilaian kelompok menjadi tiga tingkatan tersebut dilaksanakan oleh santri yang berfungsi sebagai TPM dalam kegiatan ini. Penilaian kelompok didasarkan kepada survey lapangan mengenai pencapaian usaha kelompok, proses dan perubahan di dalam kelompok, serta pemasaran hasil usaha kelompok. Survey tersebut

dilakukan dengan melihat *form* isian permodalan kelompok, melihat pencatatan di dalam kelompok (baik yang bersifat administratif maupun keuangan), serta dengan mengamati jaringan pemasaran usaha kelompok. Survey pengawasan dan penilaian ini dilakukan dua kali dalam satu tahun kegiatan. Berikut penuturan salah seorang TPM mengenai kegiatan survey tahap evaluasi ini:

Kita juga melakukan survey untuk mengevaluasi kelompok, yang disurvei itu mengenai pencapaian usaha kelompok, proses dan perubahan di dalam kelompok, pemasaran hasil usaha kelompok. Kan kita ada form isian buat kelompok, tentang permodalan kelompok, jadi kita bisa mengukur keberhasilan kelompok apakah modal bertambah atau berkurang, selain itu juga kita membaca laporan pertemuan kelompok, melihat surat-surat administrasi dan keuangan di dalam kelompok, juga kita amati hasil produksi usaha kelompok tersebut dipasarkan di mana. Jadi dari situ kita bisa mengukur kelompok apakah ada di tingkat A, tingkat B, atau tingkat C, tergantung dari hasil survey yang kita lakukan itu. Survey kita lakukan dua kali dalam setahun jadi kita bisa memperbaiki apabila ada kesalahan, ibaratnya *mid term* dan *final term* begitu. (Irf, Juni 2007).

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa tahap evaluasi kelompok yang dilakukan oleh pondok pesantren Maslakul Huda ini adalah dengan cara penyebaran TPM ke lapangan yang mengawasi langsung proses kegiatan di dalam kelompok. Penilaian di dalam kelompok tersebut meliputi masalah tertib administrasi, pertemuan kelompok, pengaturan keuangan di dalam kelompok, peningkatan jumlah produk usaha, peningkatan modal usaha, serta pemasaran hasil usaha kelompok. Berdasarkan kepada penilaian dalam kelompok, maka dilakukan kategorisasi kelompok dengan tingkatan A, B, dan C. Kelompok dengan tingkatan A merupakan kelompok yang dianggap sudah mandiri dan dianggap sudah dapat melepaskan diri dari bimbingan pondok pesantren. Dengan kata lain pondok pesantren dapat melakukan terminasi atau pemutusan hubungan antara pondok pesantren dengan kelompok.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program**

### **B. 1. Faktor Pendukung**

Selain melaksanakan aktifitas di bidang pendidikan dan pengajaran agama Islam, pondok pesantren Maslakul Huda juga berupaya untuk memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pandangan ini merupakan wujud dari gagasan besar yang menjadi landasan bagi pondok pesantren Maslakul Huda ini. Selain itu, dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat, maka akan terjalin hubungan timbal balik antara pondok pesantren dengan masyarakat sekitar. Hubungan tersebut akan saling membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Masyarakat akan terbantu dengan adanya pesantren di lingkungan mereka, dan pesantren juga akan mendapatkan dukungan yang positif dari masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan mereka.

Kontribusi yang dilakukan oleh pondok pesantren Maslakul Huda adalah dengan melaksanakan program pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir desa Kajen. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut, dapat dilihat adanya faktor yang menjadi faktor pendukung bagi pondok pesantren Maslakul Huda. Faktor pendukung itu antara lain adalah sejarah dari pondok pesantren yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat desa Kajen.

Perkembangan masyarakat desa Kajen tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pondok pesantren yang ada di desa tersebut. Dapat dikatakan bahwa desa Kajen dapat berkembang karena adanya pondok pesantren-pondok pesantren yang beraktifitas di lingkungan tersebut. Bahkan desa Kajen mendapat julukan sebagai 'desa pendidikan' dan 'desa santri', karena banyaknya pondok pesantren yang berlokasi di desa tersebut. KH Sahal Mahfudh sebagai pemimpin pondok pesantren Maslakul Huda berpandangan bahwa pondok pesantren dan masyarakat diibaratkan sebagai dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pondok pesantren membutuhkan masyarakat sebagai ladang untuk mengimplementasikan ajarannya,

dan sebaliknya masyarakat membutuhkan pondok pesantren sebagai air yang dapat menghilangkan dahaga. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang pimpinan pondok pesantren:

Karena biar bagaimanapun pondok pesantren dan masyarakat itu tidak dapat dipisahkan, ibaratnya dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pondok pesantren membutuhkan masyarakat sebagai ladang untuk mengimplementasikan ajarannya, dan sebaliknya masyarakat membutuhkan pondok pesantren sebagai air yang dapat menghilangkan dahaga (Gus, Mei 2007).

Kedekatan hubungan dengan masyarakat ini juga dilihat dari pandangan masyarakat desa Kajen yang melihat kehadiran pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat membawa berkah bagi masyarakat itu sendiri, terutama dalam bidang perekonomian. Masyarakat desa Kajen bahkan banyak yang berprofesi sebagai pengusaha yang menyediakan kebutuhan pokok bagi para santri yang bermukim di desa mereka. Berikut pengakuan salah seorang masyarakat desa Kajen:

Pondok pesantren bagi masyarakat disini itu sangat bermanfaat ya, karena pondok pesantren membawa berkah bagi kami, masyarakat disini. Dengan adanya pondok pesantren ini, jika dilihat kehidupan ekonomi masyarakat banyak yang terbantu, banyak masyarakat yang hidup dari berdagang untuk memenuhi kebutuhan para santri yang mukim di sini, atau bagi yang punya lahan malah mendirikan kosan bagi para santri (Sn, Mei 2007).

Kedekatan hubungan antara pondok pesantren dengan masyarakat desa Kajen secara umum dan khususnya dengan masyarakat yang menjadi pengusaha kerupuk merupakan faktor yang mendorong tercapainya kegiatan pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir yang dilaksanakan oleh pondok pesantren ini. Kedekatan hubungan tersebut menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pondok pesantren. Dengan berdasarkan prinsip kepercayaan inilah program ini dapat berjalan dengan lancar. Berikut penuturan pengurus BPPM:

Kita mengajarkan kepada masyarakat mengenai arti kepercayaan atau bersangka baik atau khusnuzan, di mana kita mempercayakan pinjaman tanpa bunga kepada pengusaha kerupuk pasir dan tidak ada sanksi apapun apabila mereka tidak mampu baik sengaja maupun tidak sengaja untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Tapi alhamdulillah, karena kita sudah khusnuzan kepada mereka, semuanya jadi dilancarkan oleh Allah swt, karena kita juga percaya bahwa sesuatu yang baik itu akan membawa hal yang baik pula (Skd, Juni 2007).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat dari salah seorang anggota kelompok usaha kerupuk pasir yang mendapatkan bantuan dari pondok pesantren. Di mana, kedekatan hubungan tersebut mencerminkan rasa kepercayaan kepada pondok pesantren dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pondok pesantren. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren pada prinsipnya adalah baik dan dilakukan dengan tujuan untuk kemashlahatan umatnya. Berikut pengakuan dari salah seorang anggota kelompok usaha kerupuk pasir:

Kalau dengan pondok pesantren itu kita percaya-percaya aja ya, gak mungkin gitu kalau pondok pesantren itu berniat jahat kepada masyarakat, misalnya kan kalau rentenir itu kan baik ya minjem duit buat modal tapi ujung-ujungnya nyekek leher kita, kan kalau pondok pesantren ga mungkin gitu, pasti kegiatan pondok pesantren itu diarahkan untuk kemashlahatan umatnya, jadi kita juga percaya dengan pondok pesantren, mungkin juga karena kita dari dulu-dulunya udah emang deket dengan pondok pesantren, ya bisa dilihat ramean mana pondok pesantren dengan balai desa (Rkt, Juni 2007).

Selain karena kedekatan hubungan antara masyarakat desa Kajen dengan pondok pesantren Maslakul Huda, faktor ketokohan Kyai yang sangat dominan di masyarakat desa Kajen juga menjadi salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan program pemberdayaan ini. Pengaruh ketokohan yang sangat kuat di desa Kajen menyebabkan masyarakat desa, khususnya pengusaha kerupuk pasir sangat tunduk dan patuh kepada Kyai tersebut. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini, ketundukan dan kepatuhan terhadap ketokohan Kyai sebagai individu dan pondok pesantren sebagai institusinya terlihat dari kesepakatan pengusaha kerupuk pasir

terhadap aturan main yang ditetapkan oleh pondok pesantren. Aturan main tersebut adalah dalam hal penyerahan bantuan modal dan persentase bunga yang ditetapkan oleh Kyai melalui pondok pesantren. Masyarakat tersebut berpandangan bahwa apabila tidak mengikuti aturan yang sudah diputuskan oleh Kyai, maka usaha mereka tidak akan mendapatkan berkah dari Kyai. Berikut penuturan salah seorang anggota kelompok:

Jumlah bantuan yang diberikan oleh pondok pesantren itu kan ditetapkan langsung oleh Kyai, yaitu itungannya dari besaran modal kelompok yang 1:5, kita tidak dilibatkan mengenai penghitungan bantuan itu, ya kita haru tunduk itukan keputusannya langsung dari Kyai, ya pandangan Kyai pasti itu yang paling adil buat kita coba kalau dipukul rata semua kan jadi kurang adil kesannya, kalau kita ga nurutin kata kyai itu nanti kita malah ga dapat berkahnya, sama juga dengan aturan bunga pinjaman sebesar 0,5% itu dari Kyai juga keputusannya, yang saya tau alasannya biar dapat bantu kelompok-kelompok lain, jadi dari bunga itu nantinya akan digulirkan ke kelompok baru (Rkt, Juni 2007).

Pengaruh ketokohan Kyai juga terlihat ketika pondok pesantren Maslakul Huda melaksanakan program pemberdayaan masyarakat untuk pertama kalinya di desa Kajen. Masyarakat desa Kajen pada mulanya menolak untuk menerima program pemberdayaan yang dilakukan oleh pondok pesantren. Tetapi setelah salah seorang Kyai sepuh di desa Kajen menyetujui adanya kegiatan ini, maka secara berangsur-angsur masyarakat desa Kajen mulai menerima keberadaan program pemberdayaan masyarakat ini. Pimpinan pondok pesantren menuturkannya sebagai berikut:

Namun, selain adanya hambatan kita juga dimudahkan dengan adanya dukungan yang diberikan oleh mbah Dullah (KH Abdullah Salam), beliau sepuh Kajen. Tapi dukungan tersebut setelah kami memberikan argumentasi kepada beliau. Kami menjelaskan program yang kami laksanakan adalah bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dari masyarakat sekaligus sebagai dakwah bi al-hal, selain itu kita juga membahas dalam hadist amar ma'ruf nahi munkar, yang secara filosofis dimaknai memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan dan mencegah keburukan. Dan lebih mendalam dilihat

adalah kenapa amar ma'ruf berada didepan, maksudnya untuk mencegah masyarakat melakukan kemungkaran harus dulu memahami berbagai persoalan yang mereka hadapi dengan memberikan solusi, disinilah sebenarnya nilai dibalik ajakan amar ma'ruf itu. Yaitu semangat solusi dengan memberikan alternatif pemecahan dari persoalan yang dihadapi baru mencegah yang buruk, bukan langsung melakukan pencegahan dengan membabi buta dengan larangan dari dalil agama tapi masyarakat mesti diajak untuk bangkit kita tawarkan solusi dari masalah, karena kami berpikir bahwa kita harus menjadi 'tauladan' dan kita praktek langsung ke masyarakat. Setelah Mbah Dullah menyetujui kegiatan kita, masyarakat juga akhirnya mau menerima keberadaan program ini (Gus, Mei 2007).

Faktor lain yang juga menjadi pendukung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini adalah karena adanya dukungan dari pihak-pihak lain terhadap pelaksanaan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pondok pesantren Maslakul Huda. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa dukungan moril maupun dukungan berupa pendampingan di awal pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Dukungan tersebut berasal dari Gus Dur dan dari lembaga-lembaga lain yang juga bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Pimpinan pondok pesantren menuturkannya sebagai berikut:

kebetulan usaha kita itu mendapatkan dukungan dan bantuan dari teman-teman di LP3ES dan lembaga-lembaga lainnya..sebelumnya kami juga berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gus Dur, waktu itu Gus Dur baru pulang dari Mesir, dan melalui bantuan dari beliau maka kami mendapatkan relasi lembaga-lembaga yang tadi itu. Waktu itu, setelah bertemu dengan Gus Dur, beliau kemudian menawarkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan di Pabelan (Gus, Mei 2007).

Dapat disimpulkan bahwa, terdapat faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir ini. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kedekatan hubungan antara pondok pesantren dan masyarakat yang menciptakan rasa kepercayaan yang tinggi antara pondok pesantren

dengan pengusaha kerupuk pasir. Selain itu, pengaruh ketokohan dari Kyai juga menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Faktor yang lainnya, yang dapat juga menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini adalah adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan yang bersifat moril maupun materiil.

## B. 2. Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, pondok pesantren Maslakul Huda tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi adalah adanya penolakan dari masyarakat yang berpandangan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama bukan lembaga sosial. Masyarakat desa Kajen masih memiliki pandangan tradisional yang kuat mengenai keberadaan pesantren dengan fungsi dan status sosialnya.

Masyarakat menilai bahwa pondok pesantren merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran agama Islam. Pondok pesantren memiliki fungsi sosial sebagai *social control* bagi masyarakat, melalui dalil-dalil dan ajaran agama Islam yang diterapkannya. Sulit bagi masyarakat untuk menerima pondok pesantren dengan status dan fungsi yang berbeda. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren Maslakul Huda merupakan kegiatan yang melenceng dari status dan fungsi tradisional dari pondok pesantren. Oleh karena itu, masyarakat pada awalnya melakukan penolakan terhadap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pondok pesantren tersebut. Salah seorang pimpinan pondok pesantren menuturkan sebagai berikut:

Selain itu hambatan lain pada awalnya itu adalah penerimaan dari masyarakat, di mana masyarakat masih belum terbiasa dengan adanya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pesantren, mereka taunya kalo pesantren itu merupakan tempat belajar agama Islam saja. Tapi setelah kita kasi penjelasan bahwa kegiatan pemberdayaan yang kita lakukan itu merupakan

bagian dari penerapan ajaran agama Islam. Karena dengan membantu masyarakat kita juga berarti menyiarkan ajaran agama Islam di samping kewajiban kita juga untuk saling membantu sesama umat muslim. Wajar apabila masyarakat merasa demikian karena pada saat itu, masih belum dikenal kegiatan sosial yang dilakukan oleh pondok pesantren, kita dituduh sebagai agen dari partai politik, tapi kita tidak patah semangat karena anggapan tersebut juga bukan mutlak kesalahan masyarakat. selain itu, kendala juga didapat dari pemerintah di mana pemerintah waktu itu memandang kegiatan kita seperti kegiatan yang dilakukan LSM kebanyakan waktu itu, di mana nalar yang berkembang waktu itu adalah LSM dianggap sebagai 'musuh' pemerintah dalam pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah (Gus, Mei 2007).

Penolakan tidak hanya berasal dari masyarakat, pemerintah juga sempat memberikan tekanan kepada pondok pesantren karena adanya anggapan bahwa pondok pesantren berfungsi sebagai LSM. Pemerintah pada waktu itu, mempunyai pandangan yang negatif terhadap LSM, yakni sebagai penghambat pembangunan. Akibatnya, pemerintah juga menilai bahwa kegiatan pondok pesantren Maslakul Huda akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Selain penolakan terhadap aktifitas pondok pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, terdapat pula terhadap kebijakan pondok pesantren untuk menerima bantuan dana dari Jerman. Untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pada waktu itu terdapat dana bantuan yang disalurkan oleh lembaga donor yang berasal dari Jerman. Karena status Jerman sebagai negara dengan asas dan agama yang berbeda dengan masyarakat desa Kajen, maka masyarakat desa Kajen beranggapan bahwa dana tersebut haram untuk diterima dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Mengenai hal ini, salah seorang pimpinan pondok pesantren menjelaskannya sebagai berikut:

Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, kita juga menghadapi gejolak, dalam mengambil kebijakan tersebut. tidak jarang kita akan menuai kritik atas adanya kebijakan yang dirasakan bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Namun, bagi kami itu merupakan reaksi yang menjadi pelecut bagi semangat kita untuk berjuang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. gejolak yang muncul waktu itu adalah adanya pertentangan untuk menerima bantuan dana dari Jerman atau dari Yahudi. Di mana banyak yang beranggapan bahwa bantuan dari Yahudi itu untuk menghancurkan agama Islam, seperti yang tercantum dalam Al Baqarah ayat 120. Tapi menurut kami, kami mempertimbangkan bahwa bantuan yang diberikan itu lebih besar manfaatnya bagi masyarakat, dan kami melihat dari Al Maidah ayat 5 bahwa bantuan tersebut dianggap halal apabila digunakan untuk hal yang bermanfaat, dalam hal ini untuk memberdayakan masyarakat. (Gus, Mei 2007).

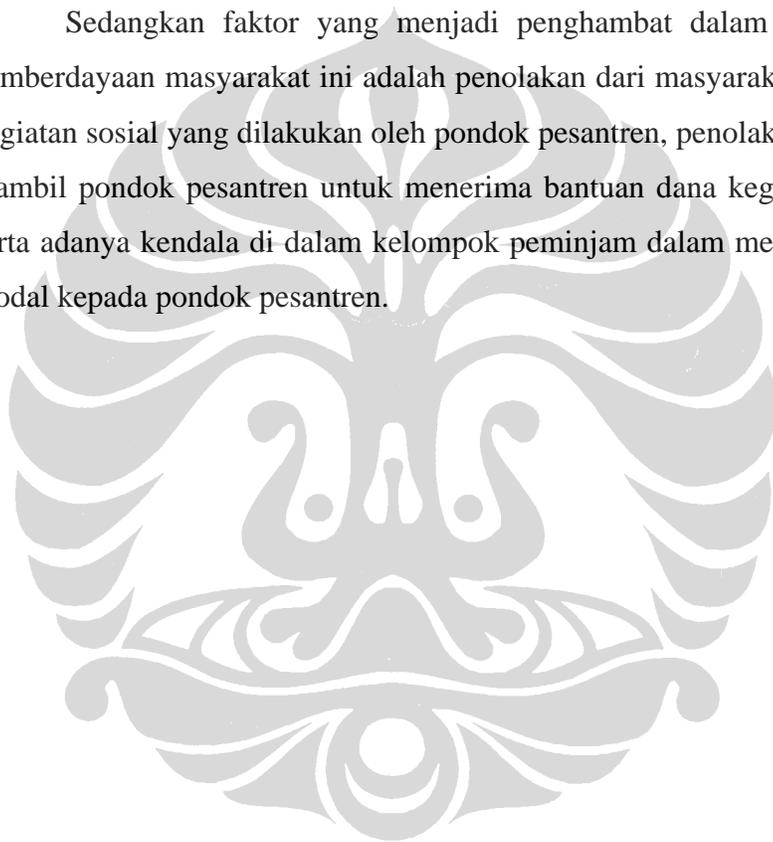
Faktor lain yang juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini adalah adanya kendala dalam pengembalian modal oleh kelompok. Pengembalian modal oleh kelompok-kelompok peminjam dapat terhambat karena faktor anggota kelompok yang masih belum bisa bertanggung jawab terhadap pinjaman modal yang diberikan. Hal ini umumnya didorong oleh keanggotaan kelompok yang didasarkan hubungan kekeluargaan. Karena hubungan kekeluargaan tersebut menyebabkan adanya ketergantungan di dalam anggota kelompok. Ketergantungan ini yang menjadi kendala bagi kelompok untuk mengembalikan modal pinjaman yang sudah diberikan kepada kelompok. Salah seorang santri yang juga menjadi tenaga pemberdayaan masyarakat menuturkan masalah ini sebagai berikut:

Kendalanya mungkin karena masih adanya pengembalian dana yang terhambat, itu sering kita temukan adanya masalah di dalam kelompok, ada pertentangan antara anggota dengan ketua, ada anggota yang tidak membantu membayar cicilan, ya namanya juga di masyarakat tidak semua sama dengan yang kita idam-idamkan, pasti ada saja kendalanya. Biasanya kendala ini muncul di dalam kelompok yang ada hubungan keluarga, jadi ada ketergantungan dari anggota kelompok terhadap anggota yang lain, hal ini yang bikin pengembalian jadi macet karena ada anggota yang bilang kalau ia ditanggung oleh saudaranya, padahal saudaranya juga belum tentu mau untuk menanggung utang pinjaman modal itu (Sb, Mei 2007).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren Maslakul Huda ini tidak terlepas

dari adanya faktor-faktor yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan. Faktor yang menjadi pendukung antara lain kedekatan hubungan antara pondok pesantren dengan masyarakat desa Kajen, pengaruh ketokohan Kyai bagi masyarakat desa Kajen, serta adanya dukungan dari pihak lain terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren Maslakul Huda.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah penolakan dari masyarakat dan pemerintah atas kegiatan sosial yang dilakukan oleh pondok pesantren, penolakan atas kebijakan yang diambil pondok pesantren untuk menerima bantuan dana kegiatan dari pihak asing, serta adanya kendala di dalam kelompok peminjam dalam mengembalikan pinjaman modal kepada pondok pesantren.



## **BAB V PEMBAHASAN**

### **A. Program Pemberdayaan Pengusaha Kerupuk Pasir Oleh Pondok Pesantren Maslakul Huda**

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan keagamaan (Islam), yang tetap mempertahankan ciri khasnya yakni pendidikan yang berpihak kepada masyarakat yang sederhana dan yang termarjinalkan. Aktifitas dan pendidikan pesantren secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam pelayanan santri dan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan pesantren kepada masyarakat tersebut ditujukan dengan memposisikan diri sebagai sebuah lembaga yang berperan aktif memajukan kehidupan masyarakat (**Nugroho**, Bab II, hal 43).

Pondok pesantren Maslakul Huda merupakan salah satu pondok pesantren yang memposisikan dirinya sebagai sebuah lembaga yang berperan aktif memajukan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di sekitar pondok pesantren. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat ini dapat dilihat dari jenis usaha kecil yang dilakoni oleh hampir sebagian besar masyarakat di sekitar pondok pesantren. Jenis usaha kecil itu adalah usaha produksi kerupuk yang menggunakan pasir sebagai pengganti minyak goreng. Penggunaan pasir tersebut disebabkan karena masyarakat tidak mampu untuk membeli minyak goreng (**lihat Bab IV**, hal 70). Kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat sekitar pondok pesantren tersebut membuat pondok pesantren Maslakul Huda berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat terutama bagi para pengusaha kerupuk pasir.